

Jumat, 18 November 2011

## Kaji Sewa Kendaraan

**Pontianak, BERKAT.**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah mengkaji kemungkinan sistem sewa untuk kendaraan dinas yang akan digunakan di lingkungan pemerintah daerah.

"Tetapi masih banyak instrumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Kamis (17/11).

Ia mencontohkan, terkait dengan inventarisasi terhadap aset-aset kendaraan dinas yang ada. Wagub Christiandy sepakat bahwa sewa kendaraan dinas dapat diterapkan dalam upaya efisiensi biaya belanja. Ia melanjutkan, Pemprov Kalbar sudah mendapatkan audit aset secara khusus dari BPK RI beberapa waktu lalu. Salah satu yang mendapat sorotan dari BPK RI terkait audit tersebut adalah aset berupa kendaraan dinas yang dimiliki Pemprov Kalbar.

"Sekarang, Pemprov Kalbar sedang menindaklanjuti hasil audit tersebut. Segera setelah kami selesai dalam melakukan penertiban aset sebagai tindak lanjut dari audit BPK, akan dapat segera direalisasikan kebijakan sewa kendaraan dinas," kata Wagub.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kalbar menyarankan agar pemerintah provinsi menerapkan sistem sewa kendaraan untuk keperluan dinas. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kalbar, Alifuddin, kebijakan tersebut untuk efisiensi biaya kendaraan dinas dan sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Ia berpendapat, jika menerapkan sistem sewa, Pemprov Kalbar tidak perlu menganggarkan dana besar untuk membeli kendaraan dinas, biaya perawatan serta operasional setiap tahun. "Pemprov hanya mengeluarkan biaya operasional untuk bahan bakar minyak (BBM), selain untuk mencegah agar tidak dimiliki pihak yang tidak berhak," katanya. (nia)